

**Judul** : Kasus kekerasan anak meningkat: bikin program pencegahan, jangan tunggu ada korban  
**Tanggal** : Kamis, 27 November 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 10

## Kasus Kekerasan Anak Meningkat

# Bikin Program Pencegahan, Jangan Tunggu Ada Korban

Senayan menyangkan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, utamanya di lingkungan pendidikan. Pemerintah dan para pemangku kepentingan diminta memperkuat langkah antisipasi mencegah kasus ini terus terulang.

ANGGOTA Komisi XIII DPR Anisah Syukur mendesak aparat untuk mengusut tuntas setiap kasus kekerasan. "Pastikan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial terhadap korban hingga pulih sepenuhnya," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Dia bilang, upaya pendampingan tidak akan efektif tanpa diikuti langkah pencegahan yang jelas dan terukur. Sehingga, Pemerintah harus memastikan korban mendapatkan perlindungan secara penuh. "Jadi bukan hanya saat kasus muncul, tetapi sampai proses pemulihan selesai," ucap anggota Fraksi PKB ini.

Anisah menilai, lemahnya langkah antisipasi membuat kasus kekerasan terhadap anak terus berulang. Karena itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus memastikan program pencegahan di sekolah

dan lingkungan anak berjalan secara efektif. "Kalau hanya menunggu ada korban, maka kekerasan akan terus terjadi di mana-mana," jelasnya.

Diketahui, berdasarkan laporan KPAI terdapat 2.057 pengaduan sepanjang 2024. Dari jumlah itu sebanyak 954 kasus telah ditindaklanjuti hingga tahap terminasi atau proses akhir. UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2024 menegaskan anak di satuan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, maupun bentuk kekerasan lainnya.

Anisah mengeluhkan masih lemahnya implementasi regulasi perlindungan anak di sekolah, meski berbagai aturan telah diterbitkan. Sehingga, Pemerintah perlu memperjelas langkah konkret di lapangan. "Apa yang



Anisah Syukur

membuat program pencegahan tidak berjalan efektif? Ini yang perlu dijelaskan," tandasnya.

Perlindungan anak harus menjadi prioritas negara. Sebab yang dibutuhkan saat ini adalah program nyata. "Ini untuk memastikan sekolah menjadi ruang aman bagi anak-anak, dan tidak ada lagi korban berikutnya," tandasnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani ikut prihatin atas meningkatnya kasus bullying atau perundungan di sekolah. Data KPAI menun-

jukkan tren kenaikan signifikan, dengan 1.052 kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2025. Dari jumlah itu, 16 persen terjadi di lingkungan sekolah.

"Meskipun hanya 16 persen, ini menunjukkan satuan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman dan ramah anak ternyata masih menyimpan celah dalam mencegah dan menangani kekerasan," ujar Lalu Hadrian dalam keterangannya, Rabu (26/11/2025).

Lalu Hadrian menegaskan, situasi ini tidak boleh dianggap sepele karena kasus *bullying* justru terjadi di tempat yang seharusnya melindungi anak. Padahal, Pemerintah telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan.

Bagaimana tanggapan Pemerintah? Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Arifah Fauzi mengatakan, gerakan #RukunSamaTeman menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan anak dan memastikan sekolah sebagai

ruang aman, nyaman, dan bebas kekerasan.

Melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), gerakan ini diarahkan untuk membangun budaya positif yang bertumpu pada rasa saling menghargai dan kepedulian antar pelajar.

"Pemenuhan hak dasar anak tidak hanya mencakup kebutuhan fisik, tetapi juga rasa aman dan lingkungan belajar yang suportif," ujar Arifah dalam keterangannya, Rabu (26/11/2025).

Arifah menegaskan, sekolah memegang peran sentral dalam menumbuhkan kepercayaan diri pelajar. Percaya diri dimulai dari mengenali potensi diri. "Ketika anak merasa berharga, mereka lebih siap berinteraksi, belajar, dan berkembang," kata dia.

Dia menegaskan, anak-anak berhak atas keamanan fisik dan psikologis. Anak terlantar bukan hanya yang tidak memiliki rumah, tetapi juga mereka yang tidak terpenuhi hak-haknya. "Ini yang harus kita cegah," pungkasnya. ■ TIF